

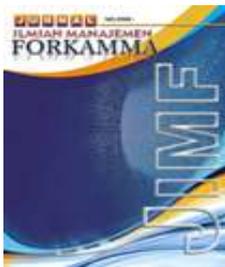
**ANALISIS PENGARUH PROSES PERENCANAAN ANGGARAN,
ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN VERIFIKASI
DOKUMEN PEMBAYARAN TERHADAP PROGRES PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA
(STUDI KASUS : SATKER SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI)**

Syakhrial¹⁾

¹⁾ dosen universitas pamulang, email : efriadisyahrial@gmail.com

**ARTICLES
INFORMATION**

ABSTRACT



**JURNAL ILMIAH
MANAJEMEN FORKAMMA**

Vol.1, No.2, Februari 2018
Halaman : 1 – 20
© LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2599-171X
ISSN (print) : 2598-9545

Keyword :

*Budgeting Planning Process,
Procurement Administration,
Payment Document Verification,
and Consumption Budgeting
Implementation Progress*

JEL. classification :

C42, G20, G38, N45, N65

Contact Author :

**PRODI
MAGISTER MANAJEMEN &
FORKAMMA UNPAM**

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang
Tangerang Selatan – Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email :

jurnalforkamma.unpam@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Administrasi Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dan mengetahui pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji homogenitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji Regresi Berganda, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis. Hasil Penelitiannya adalah : (1) Terdapat pengaruh Proses Perencanaan Anggaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, (2) Terdapat pengaruh Administrasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, (3) Terdapat pengaruh Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dan (4) Terdapat pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

The purpose of this study to determine the udgeting Planning Process effect on Consumption Budgeting Implementation Progress, knowing Procurement Administration effect on Consumption Budgeting Implementation Progress, knowing Payment Document Verification effect on Consumption Budgeting Implementation Progress, and know the influence of Budgeting Planning Process, Procurement Administration, Payment Document Verification simultaneously against Consumption Budgeting Implementation Progress. This research uses quantitative method with survey technique. The classical assumption test consisted of normality test, homogeneity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. Multiple Linear Regression Test, Correlation Coefficient Test, Determination Coefficient Test, and Hypothesis Test. The result of research are : (1) There is influence of Budgeting Planning Process to Consumption Budgeting Implementation Progress, (2) There is influence of Procurement Administration to Consumption Budgeting Implementation Progress, (3) There is influence of Payment Document Verification to Consumption Budgeting Implementation Progress, and (4) There is influence of Budgeting Planning Process, Procurement Administration, and Payment Document Verification simultaneously to Consumption Budgeting Implementation Progress.

A. Pendahuluan

Tingkat penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran, dan selalu terjadi setiap tahunnya, hal ini hampir terjadi di semua Kementerian Negara/Lembaga di tingkat pusat maupun daerah serta pada satuan kerja-satuan kerja pada Kementerian/Lembaga terkait. Pola penyerapan belanja seperti inipun terjadi juga pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam skala Nasional dengan adanya penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran akan berakibat pada terganggunya rencana kebijakan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyatakan, “Dari bulan ke bulan, penyebab lambatnya penyerapan itu-itu saja, dari tahun ke tahun, saya mengambil kesimpulan, berulang-ulang terjadi. Sudah disadari penyebabnya tidak ada perubahan masalah mendasar, adalah soal *culture* (budaya), *behavior* (sikap) masyarakat Indonesia pada umumnya, kebiasaan menyelesaikan segala sesuatu pada *last minute* (dekat tenggat).” (Agus Suprijanto, 2012). Secara garis besar penyerapan belanja kementerian/lembaga, seperti antara lain : a. Keterlambatan penetapan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengelola kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan Daerah; b. Reorganisasi; c. Penyempurnaan business process; d. Faktor kehati-hatian kementerian/lembaga; dan e. Mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain 1). Banyaknya sanggahan dalam proses lelang; 2). Banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan; dan 3). Masalah pengadaan lahan/tanah.

Disamping itu juga dapat diduga yang menjadi faktor keterlambatan dalam penyerapan APBN, khususnya oleh Kementerian/Lembaga, yaitu : a. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); b. Tidak disiplinnya penyampaian laporan keuangan ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan satker terkena sanksi penundaan pencairan; c. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran harus direvisi; dan d. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik.

Dengan rendahnya penyerapan belanja K/L pada awal tahun anggaran dan tinggi pada akhir tahun anggaran dapat berpotensi menimbulkan kualitas output yang kurang baik, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan peredaran uang yang tinggi cenderung memicu kepada peningkatan inflasi. Untuk menghindari pola penyerapan belanja yang berulang kali menumpuk di akhir tahun, perlu dirumuskan identifikasi permasalahan penyebab dan usulan perbaikan kebijakan yang perlu ditingkatkan, sehingga kinerja penyerapan belanja dapat ditingkatkan dan sesuai dengan jadwal yang semestinya.

Perencanaan penarikan dana satuan kerja pengguna anggaran pada halaman 3 DIPA cenderung proporsional, yaitu membuat rencana penarikan dana bulanan terbagi ke dalam dua belas bagian dari dana pagu yang dimiliki, namun pada kenyataannya pada triwulan pertama progres penyerapan dana masih dibawah 25% yaitu : tahun 2011 sebesar 8,63%; tahun 2012 sebesar 11,22%; dan tahun 2013 sebesar 7,34%. Pada triwulan kedua kumulatif masih dibawah 50%, yaitu: tahun 2011 sebesar 22,08%, terdapat kenaikan sebesar 13,45%; tahun 2012 sebesar 31,63%; terdapat kenaikan sebesar 20,41%; dan tahun 2013 sebesar 27,54%, terdapat kenaikan sebesar 20,19%. Pada triwulan ketiga kumulatif masih dibawah 75%, yaitu: tahun 2011 sebesar 43,16%, terdapat kenaikan sebesar 21,08%; tahun 2012 sebesar 50,65%, terdapat kenaikan sebesar 19,03%; dan tahun 2013 sebesar 51,52%, terdapat kenaikan sebesar 23,98%. Sedangkan untuk triwulan keempat sendiri tercapai sampai dengan : tahun 2011 sebesar 86,83%, terdapat kenaikan sebesar 43,67%; tahun 2012 sebesar 88,07%, terdapat kenaikan sebesar 37,41%; tahun 2013 sebesar 96,31%, terdapat kenaikan sebesar 44,79%.

Dari data ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat hambatan yang menyebabkan progres penyerapan tidak proporsional sesuai dengan rencana penarikan per-triwulannya, sehingga capaian progres yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.

Penyajian ini semata-mata bertujuan untuk melihat sejauh mana perbandingan penyerapan dana untuk setiap triwulan dan setiap tahunnya, yang diharapkan dapat menggambarkan secara keseluruhan pola pencapaian target dari rencana penyerapan anggaran tersebut.

PROGRES REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA SEKRETARAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

NO	TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN DALAM DIPA (RP)	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENERAPAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA											
				PROGRES TRIWULAN I		PROGRES TRIWULAN II			PROGRES TRIWULAN III			PROGRES TRIWULAN IV			
				NOMINAL	(%)	NOMINAL	(%)	(% KEWAKILAN)	NOMINAL	(%)	(% KEWAKILAN)	NOMINAL	(%)	(% KEWAKILAN)	
1	2011	69,075,016,000	67,690,976,000	5,959,423,755	8.63	15,249,963,000	22.08	13.45	29,195,411,910	43.16	21.08	58,740,474,706	86.83	43.67	
2	2012	58,397,300,000	54,217,572,000	6,575,798,671	11.22	18,532,640,858	31.63	20.41	27,463,481,904	50.65	19.03	47,747,237,328	88.07	37.41	
3	2013	59,046,401,000	54,632,391,000	4,335,475,354	7.34	16,258,710,659	27.54	20.19	28,146,439,541	51.52	23.98	52,614,956,669	96.31	44.79	

Sejak Tahun 2012 DIPA diserahkan lebih awal, ini merupakan komitmen untuk pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat pada waktunya. Dengan demikian, program pembangunan nasional yang berpihak pada kesejahteraan bisa segera dilaksanakan. Dalam upaya efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja, Pemerintah mulai bulan April 2012 memberlakukan sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Penerapan sistem ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012. Dalam Perpres yang mengacu pada Undang-Undang mengenai APBN-P 2012 itu disebutkan, K/L yang melakukan optimalisasi anggaran belanja dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut penghargaan. "Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud merupakan hasil lebih yang diperoleh setelah pelaksanaan atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai," (Pasal 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2012).

Konsekwensi dari undang-undang ini telah diberlakukan dengan menurunnya pagu anggaran tahun 2012 terhadap pagu anggaran tahun 2011 karena pada tahun 2011 Progres Penyerapan Anggaran hanya tercapai 86,83%. Komitmen dari pimpinan pada tahun 2012 yaitu melaksanakan SKPA sebagai Ujicoba Dekonsentrasi, kemudian pada

tahun 2013 melaksanakan Dekonsentrasi kepada 12 Provinsi sebagai Pelaksana Binjakonda, untuk tujuan optimalisasi penyerapan anggaran belanja. Sementara K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut sanksi. Adapun, bentuk penghargaan yang diberikan berupa tambahan alokasi anggaran K/L, prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan dan prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan. Sementara, sanksi dikenakan paling banyak sebesar anggaran belanja tidak terserap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan dan menurunkan pelayanan kepada publik. (Pasal 3 Perpres Nomor 39 Tahun 2012).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh secara parsial antara proses perencanaan anggaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
2. Adakah pengaruh secara parsial antara proses administrasi pengadaan barang/jasa terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
3. Adakah pengaruh secara parsial antara proses verifikasi dokumen pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
4. Adakah pengaruh secara bersama-sama/simultan antara proses perencanaan anggaran, proses administrasi pengadaan barang/jasa, dan proses verifikasi dokumen pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja?

C. Tujuan Penelitian

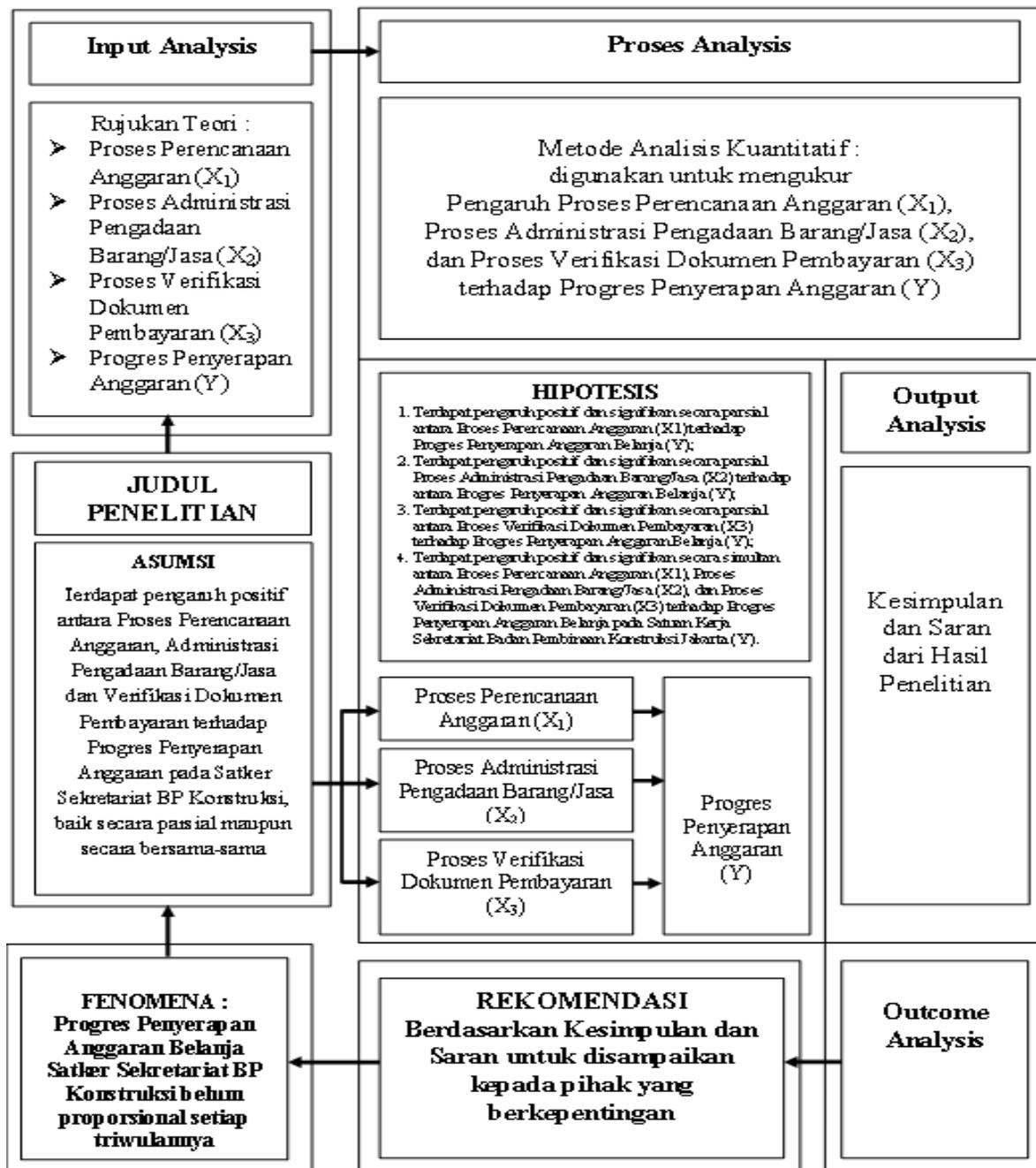
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh proses perencanaan anggaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.
2. Untuk mengetahui pengaruh proses administrasi pengadaan barang/jasa terhadap progres penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.
3. Untuk mengetahui pengaruh proses verifikasi dokumen pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.
4. Untuk mengetahui pengaruh proses perencanaan anggaran, proses administrasi pengadaan barang/jasa, dan proses verifikasi dokumen pembayaran secara bersama-sama terhadap progres penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikirnya adalah “Jika Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran berjalan dengan baik maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja di Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi akan optimal dan sesuai jadwal.”

Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

E. Landasan Teori

Proses Perencanaan Anggaran

Proses Perencanaan Anggaran yaitu suatu proses penyusunan RKA-K/L dengan menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja, dapat juga diartikan sebagai penyelesaian RKA-K/L sampai dengan pengesahan DIPA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusnya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.

Penyusunan Standar Biaya Keluaran, standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam penerapan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja), pada Pasal 5 ayat (3) PP 90 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Penyusunan RKA-K/L sebagai mana dimaksud ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja". Selanjutnya dalam penjelasan PP berkenaan disebutkan bahwa yang dimaksud standar biaya masukan (SBM) maupun standar biaya keluaran (SBK) sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. SBK disusun pada tataran keluaran (*output*) kegiatan yang disepakati antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :

- 1) Pelelangan
 - a) Tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi:
 - i) Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur;
 - ii) Pelelangan Umum pascakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - iii) Pelelangan Umum prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - iv) Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem gugur dengan ambang batas; atau
 - v) Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
 - b) Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur.
 - c) Tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
 - d) Tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
 - e) Tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem gugur dengan ambang batas.
 - f) Tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
 - g) Penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.
- 2) Penunjukan Langsung
 - a) Tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk:
 - i) penanganan darurat; dan
 - ii) bukan penanganan darurat.
 - b) Tahapan Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi:
 - i) pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii) persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau dana siap pakai untuk penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - iii) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA kepada Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

- iv) Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan
 - c) Tahapan Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat.
 - d) Penyusunan jadwal pelaksanaan Penunjukan Langsung diserahkan kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- 3) Pengadaan Langsung
- a) Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
 - i) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - ii) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK;
 - b) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
- 4) Sayembara
- Tahapan pelaksanaan Sayembara meliputi:
- a) pengumuman;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara;
 - e) pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara;
 - f) pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal Teknis;
 - g) pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS);
 - h) penetapan pemenang; dan
 - i) pengumuman pemenang.

Verifikasi Dokumen Pembayaran.

Pasal 19 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya pembayaran APBN tersebut dilakukan oleh KPPN. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk :

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
- 5) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kewajiban dalam rangka pelaksanaan pembayaran ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 pada pasal 11 sebagai berikut :

- 1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.
- 2) Pengujian substantif dilakukan untuk:
 - a) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
 - b) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
 - c) Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);

- d) Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
- e) Menguji faktur pajak beserta SSP-nya;
- 3) Pengujian formal dilakukan untuk:
 - a) Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dengan spesimen tandatangan;
 - b) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

F. Metodologi Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi Jakarta, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terutama pada Bagian Keuangan dalam rangka untuk mengungkapkan besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini menguji pengaruh Proses Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Administrasi Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dan mengetahui pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

Penelitian ini dilakukan selama penulis bertugas di Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sampai penulisan thesis ini berlangsung.

Metode Penelitian

Kategori penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan realibilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur, atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. (Sugiono, 2011:146). Dengan pendekatan penelitian tersebut, penulis berusaha merumuskan kebenaran dari teori atau kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan buku-buku dengan cara menerapkannya dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penyusunan tesis ini diperlukan data dan informasi untuk dianalisis agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi langsung dan dengan cara membagikan angket kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan jawaban data secara obyektif dan cepat, yaitu ke Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi Jakarta. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari

responden. (Sugiyono, 2011:142). Teknik Kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner terstruktur terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup berupa suatu pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dengan menggunakan skala Likert. Dalam menggunakan skala Likert dalam penelitian ini, jawaban terdiri dari lima pilihan, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian nilai (skor) untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5, dan seterusnya sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) yang diberikan nilai 1. Sementara dalam pertanyaan terbuka responden mengisi jawaban dalam kolom kosong apabila terdapat permasalahan yang tidak tercantum dalam pertanyaan tertutup.

- b. Observasi, yaitu pengamatan kegiatan adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2011:145). Menurut Prof. Heru mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan dilakuakn secara sistematis, tersencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mangamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

.Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pegawai dan staf Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi dan Pelaksana Binjakonda 12 Provinsi, sebanyak 120 orang, yang terdiri dari Golongan/Jabatan IV, III, II dan I, Jumlah sampel ditentukan dengan teknik Probability Sampling dengan Proportionate Stratified Random Sampling, yaitu Teknik menentukan jumlah sampel, bila populasi mempunyai anggota/unsur tidak homogen dan berstrata secara proporsional. (Sugiyono, 2012:118). Dengan menggunakan tabel 3.5, bila jumlah populasi sebanyak 120 orang, dengan kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya sebanyak 89 orang, karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata, Sampel sebanyak 89 orang yang terdiri dari Golongan IV sejumlah 13,35 dibulatkan menjadi 13 orang, Golongan III 57,11 dibulatkan menjadi 57 orang dan Golongan II/I 18,54 dibulatkan menjadi 19 orang, sehingga Sampel diambil sebanyak 89 responden.

G. Hasil dan Pembahasan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan menggunakan program SPSS versi 19.0

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bermaksud untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan yaitu, jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan signifikansi $< 0,05$ maka tidak berdistribusi normal, Priyatno (2013:26). Menurut Santoso (2012:69), dasar pengambilan keputusan uji normalitas:

- (1) Dengan membandingkan Kolmogorov Smirnov
 - (a) Jika Kolmogorov-Smirnov $_{hitung} < \alpha (0,05)$ Kolmogorov-Smirnov $_{tabel}$, H_0 diterima
 - (b) Jika Kolmogorov Smirnov $_{hitung} > \alpha (0,05)$ Kolmogorov Smirnov $_{tabel}$, H_0 ditolak
- (2) Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :
 - (a) Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

(b) Probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Progres Penyerapan Anggaran Belanja	
N	89
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	118,34
Std. Deviation	16,742
Most Extreme Differences	
Absolute	,158
Positive	,098
Negative	-,158
Kolmogorov-Smirnov Z	1,487
Asymp. Sig. (2-tailed)	,024
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- (1) Nilai Kolmogorov-Smirnov *hitung* (1,487) < Kolmogorov-Smirnov *tabel* (10,00), maka H_0 diterima (data berdistribusi normal).
- (2) Nilai signifikansi sebesar 0,024 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data variabel tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis *independent sample t test* dan ANOVA yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel yang pada umumnya dipakai untuk membuktikan hipotesis komparatif. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

Untuk menyatakan apakah data berasal dari populasi yang bervariasi homogen atau tidak homogen, ada dua alternatif ukuran yang dapat digunakan sehingga dapat menyatakan menerima atau menolak H_0 , (Sudarmanto, 2013:145).

- (1) Jika signifikan *hitung* > α (0,05) , maka varians setiap sampel sama (homogen);
- (2) Jika signifikan *hitung* < α (0,05) , maka varians setiap sampel tidak sama (tidak homogen);

Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas

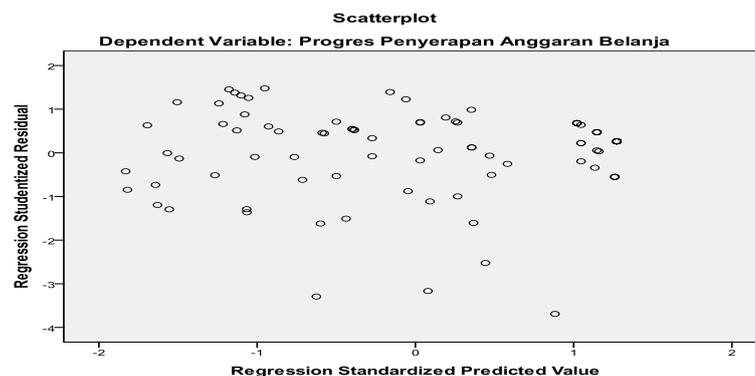
Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Progres Penyerapan Anggaran Belanja	Based on Mean	,022	3	24	,995
	Based on Median	,025	3	24	,995
	Based on Median and with adjusted df	,025	3	21,654	,995
	Based on trimmed mean	,024	3	24	,995

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0

Berdasarkan hasil analisis di atas ditunjukkan bahwa untuk hasil olah data Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, menunjukkan Signifikansi based on Mean sebesar 0,995 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data tersebut dari populasi yang bervariasi homogen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi, (Priyatno, 2013:60). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau dari satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residu atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*. Jika varians berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *homokedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED.



Gambar 4.5 Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0

Berdasarkan Grafik Scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas pada data tersebut, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk variabel proses perencanaan anggaran, proses administrasi pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi progres penyerapan anggaran belanja di Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.

d. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna, (Priyatno 2013:59). Uji asumsi multikolinieritas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas(independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen). Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya sebagai berikut :

- (1) Jika nilai toleransi tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF di atas 10, maka model regresi tersebut terdapat problem multikolinieritas;
- (2) Jika nilai toleransi mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas, (Sudarmanto, 2013:235).

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	Proses Perencanaan Anggaran	,278	3,596	
	Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	,301	3,317	
	Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran	,485	2,062	
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk lolos dari uji multikolinieritas sudah terpenuhi oleh seluruh variabel independen yang ada, yaitu nilai *tolerance* yang tidak kurang dari 0,10 ($X_1=0,278$; $X_2=0,301$ dan $X_3=0,485$) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) yang tidak lebih dari 10 ($X_1=3,596$; $X_2=3,317$; $X_3=2,062$), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak berkorelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya.

2. Regresi Regresi Berganda

Selanjutnya dianalisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) yang terdapat pada tabel *Coefficients* yang gunanya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas (variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Progres Penyerapan Anggaran Belanja). Sehingga dapat diketahui apakah ketiga variabel bebas tersebut memiliki korelasi positif atau negatif terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Ganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,945	1,886		,501	,618

Coefficients ^a					
Proses - Perencanaan Anggaran_X1	,453	,103	,465	4,405	,000
Proses - Administrasi Pengadaan Barang/Jasa_X2	,051	,098	,052	,517	,606
Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran_X3	,452	,086	,419	5,251	,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y					

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas dapat disajikan ke dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 0,945 + 0,453X_1 + 0,051X_2 + 0,452X_3$

- Konstanta sebesar 0,945, menyatakan bahwa jika semua variabel bebas (variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran) dianggap konstan atau memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Progres Penyerapan Anggaran Belanja/Beta) akan sebesar 0,945 bertanda positif.
- Nilai koefisien sebesar 0,453 dan bertanda positif untuk variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1) ini mengandung arti bahwa Proses Perencanaan Anggaran (X_1) mempunyai pengaruh positif dan searah terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Artinya jika variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1) meningkat satu satuan dengan asumsi pada konstanta 0,945 dan variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), variable Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) konstan/tetap atau 0, maka variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,453.
- Nilai koefisien sebesar 0,051 dan bertanda positif untuk variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) ini mengandung arti bahwa Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) mempunyai pengaruh positif dan searah terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Artinya jika variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) meningkat satu satuan dengan asumsi pada konstanta 0,945 dan variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1), variable Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) konstan/tetap atau 0, maka variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,051.
- Nilai koefisien sebesar 0,452 dan bertanda positif untuk variabel Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) ini mengandung arti bahwa Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) mempunyai korelasi positif dan searah terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Artinya jika variabel Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) meningkat satu satuan dengan asumsi pada konstanta 0,945 dan variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1), variable Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) konstan/tetap atau 0, maka variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,452.
- Sedangkan bila X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama ditingkatkan satu satuan secara bersama-sama maka Y akan meningkat sebesar 0,956. Hal ini dapat dilihat dari persamaan :

$$\begin{aligned}
 Y &= 0,945 + 0,453X_1 + 0,051X_2 + 0,452X_3 \\
 &= 0,945 + [(0,453.1) + (0,051.1) + (0,452.1)] \\
 &= 0,945 + [0,956]
 \end{aligned}$$

3. Koefisien Korelasi

Uji Koefisien Korelasi Pearson adalah uji statistik untuk menguji 2 variabel yang berdata rasio ataupun data kuantitatif yang berisi angka riil yaitu data sesungguhnya yang diambil langsung dari angka asli. Syarat lain untuk uji korelasi Pearson adalah data berdistribusi normal. Sebagai bagian dari statistik parametrik terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data sebelum uji korelasi. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R .

a) Koefisien Korelasi Variabel X_1

Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R , yang akan menguji keeratan pengaruh antara Proses Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X_1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,801 ^a	,642	,638	2,802
a. Predictors: (Constant), Proses Perencanaan Anggaran				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0.

Tingkat keeratan pengaruh antara Proses Perencanaan Anggaran (X_1) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) ditunjukkan oleh korelasi (**Error! Reference source not found.**) sebesar 0,801. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi di atas, ternyata bahwa koefisien korelasi antara Proses Perencanaan Anggaran (X_1) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.801 menunjukkan pengaruh kuat.

b) Koefisien Korelasi Variabel X_2

Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R , yang akan menguji keeratan pengaruh antara Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X_2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 ^a	,514	,508	3,268
a. Predictors: (Constant), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0.

Tingkat keeratan pengaruh antara Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) ditunjukkan oleh korelasi (**Error! Reference source not found.**) sebesar 0,717. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi di atas, ternyata bahwa koefisien korelasi antara Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.717 menunjukkan pengaruh kuat.

c) Koefisien Korelasi Variabel X_3

Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R , yang akan menguji keeratn pengaruh antara Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X_3

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780^a	,608	,603	2,935
a. Predictors: (Constant), Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0.

Tingkat keeratn pengaruh antara Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) ditunjukkan oleh korelasi (**Error! Reference source not found.**) sebesar 0,780. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi seperti pada tabel di atas, ternyata bahwa koefisien korelasi antara Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) signifikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.780 menunjukkan pengaruh yang kuat.

4. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil koefisien determinasi (R^2) pada tabel *Model Summary* yang akan sangat berguna untuk menganalisis besaran dan interpretasi pengaruh dari variabel-variabel bebas (variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3)) atas variabel terikat Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y).

Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858^a	.737	.728	2.431
a. Predictors: (Constant), Proses Perencanaan Anggaran_X1, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa_X2, Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran_X3. b. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y				

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0

Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,858. Dengan mengacu pada tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R , Sugiono, 2012. Maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1), variable Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), dan variable Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) secara bersama-sama

terhadap variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Selanjutnya kita lihat nilai koefisien determinasi (R^2) atau *R Square* sebesar 0,737 dimana $Kd = R^2 \cdot 100\%$ yaitu $0,737 \times 100\% = 73,7\%$, yang bermakna bahwa 73,7% variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja memiliki keterkaitan pengaruh dengan variabel Proses Perencanaan Anggaran (X_1), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) secara bersama-sama/simultan. Sedangkan 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak penulis teliti dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. Dimana t tabel diperoleh dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ (satu sisi) dengan $dk = n-k-1$ ($89-3-1$) = 85. Berdasarkan nilai $\alpha = 0,05$ dan $dk = 85$ diperoleh $t_{tabel} = 1,988$.

(1) Uji t - X_1 terhadap Y

Hipotesis penelitian ini berbunyi diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Proses Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana dapat kita lihat pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.

Tabel 4.16 Hasil Uji t Variabel X_1 atas Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,040	1,883		3,207	,002
Proses Perencanaan Anggaran	,781	,062	,801	12,498	,000

a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0

Hasil analisis menunjukkan koefisien konstanta besarnya 6,040; Koefisien Proses Perencanaan Anggaran (X_1) besarnya 0,781. Koefisien tersebut signifikan karena signifikansinya 0,000. Jadi persamaan garis regresinya adalah $Y = 6,040 + 0,781X_1$. Persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila Proses Perencanaan Anggaran (X_1) ditingkatkan satu satuan, maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,781 satuan pada konstanta 6,040.

(2) Uji t - X_2 terhadap Y

Hipotesis penelitian ini berbunyi diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana dapat kita lihat pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.

Tabel 4.18 Hasil Uji t Variabel X₂ atas Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,623	2,183		3,950	,000
Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	,695	,073	,717	9,583	,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja					

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0.

Hasil analisis menunjukkan koefisien konstanta besarnya 8,623; Koefisien Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X₂) besarnya 0,695. Koefisien tersebut signifikan karena signifikansinya 0,000. Jadi persamaan garis regresinya adalah $Y = 8,623 + 0,695X_2$. Persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X₂) ditingkatkan satu satuan, maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,695 satuan pada konstanta 8,623.

(3) Uji t - X₃ terhadap Y

Hipotesis penelitian ini berbunyi diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X₃) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana dapat kita lihat pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.

Tabel 4.20 Hasil Uji t Variabel X₃ atas Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,472	2,160		2,071	,041
Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran	,839	,072	,780	11,608	,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y					

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0.

Hasil analisis menunjukkan koefisien konstanta besarnya 4,472; Koefisien Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X₃) besarnya 0,839. Koefisien tersebut signifikan karena signifikansinya 0,000. Jadi persamaan garis regresinya adalah $Y = 4,472 + 0,839X_3$. Persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X₃) ditingkatkan satu satuan, maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,839 satuan pada konstanta 4,472.

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan/bersama-sama terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja. Untuk mengetahuinya digunakan uji Statistik F (uji F). Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) dengan rumus : dk

= $n-k$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel yang diteliti.

Kemudian membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan kriteria :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, (α, dk), berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, (α, dk), berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dimana derajat kebebasan (dk) adalah :

$$dk = n - k = 89 - 4 = 85$$

$$F_{tabel} = F(\alpha; dk) = (0,05; 85) = 2,480$$

Setelah diketahui nilai F_{tabel} adalah 2,480 lalu akan dibandingkan dengan F_{hitung} yang dihasilkan dari pengolahan data pada program SPSS 19.00 Untuk mengetahui hasil uji signifikansi secara bersama-sama dengan menggunakan uji F, dapat di lihat pada tabel ANOVA di bawah ini:

Tabel 4.22 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1407,521	3	469,174	79,370	,000 ^a
	Residual	502,456	8	5,911		
	Total	1909,978	8			
a. Predictors: (Constant), Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran_X1, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa_X2, Proses Perencanaan Anggaran_X3 b. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y						

Sumber : Data Primer, diolah dengan SPSS 19.0

Dari output data di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai F_{hitung} sebesar 79,370 dengan signifikansi sebesar 0,000;
- 2) Nilai $F_{tabel} = F(0,05;85)$ angka derajat kebebasan 85 tersebut pada tingkat kesalahan 5% = 2,480; Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $79,370 > 2,480$; dan Signifikansi $F = 0,000 < 0,05$ yang berarti sangat signifikan;
- 3) Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan antara variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan/bersama-sama terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

H. Kesimpulan

Penelitian ini menguji Proses Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Administrasi Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, mengetahui Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dan mengetahui pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran secara simultan terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja. Hasil yang didapat antara lain:

1. Proses Perencanaan Anggaran secara parsial terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dari hasil analisis didapat nilai koefisien (R) sebesar 0.801 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat, sedangkan koefisien determinasi diperoleh $R^2 = 0,642$ berarti bahwa besarnya pengaruh sebesar 64,2% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) dapat dijelaskan oleh varians Proses Perencanaan Anggaran (X_1) melalui persamaan regresinya adalah $Y = 6,040 + 0,781X_1$.
2. Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa secara parsial terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dari hasil analisis didapat

- nilai koefisien (R) sebesar 0.717 menunjukkan pengaruh yang kuat, sedangkan koefisien determinasi diperoleh R Square (R^2) = 0,514 berarti bahwa besarnya pengaruh sebesar 51,4% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) dapat dijelaskan oleh varians Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2) melalui persamaan regresinya adalah $Y = 8,623 + 0,695X_2$.
3. Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran secara parsial terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dari hasil analisis didapat nilai koefisien (R) sebesar 0.780 menunjukkan pengaruh yang kuat, sedangkan koefisien determinasi diperoleh R Square (R^2) = 0,608 berarti bahwa besarnya pengaruh sebesar 60,8% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) dapat dijelaskan oleh varians Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) melalui persamaan regresinya adalah $Y = 4,472 + 0,839X_3$.
 4. Secara simultan terbukti bahwa, Proses Perencanaan Anggaran (X_1), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y), dari hasil analisis didapat nilai koefisien (R) sebesar 0,858 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat, sedangkan koefisien determinasi simultan diperoleh R Square (R^2) = 0,737 berarti bahwa 73,7% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) dapat dijelaskan oleh varians Proses Perencanaan Anggaran (X_1), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X_2), dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X_3) melalui persamaan regresinya adalah $Y = 0,945 + 0,453X_1 + 0,051X_2 + 0,452X_3$, yang berarti 26,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

I. Daftar Pustaka

Buku - Buku

1. Tim Satker, 2014, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Kegiatan Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi*, Jakarta.
2. Sarwono, Jonathan. 2012, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
3. Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, ALFABETA, CV, Bandung.
4. Herriyanto, Hendris. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta, Tesis, Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.*
5. Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
6. Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
7. Suhartono dan Irawan, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, P.T. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
8. _____, 2010, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
9. _____, 2009, *Renstra Badan Pembinaan Konstruksi*, BP Konstruksi, Jakarta.

Perundang - Undangan

1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang *Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta
3. Ditjen Perbendaharaan. 2011, *Hasil Monitoring dan Evaluasi Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran*, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri*, Jakarta.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 tentang *Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN*, Jakarta.
6. Keputusan No. 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai perubahan dari Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003*, Jakarta.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Terhadap Bendahara oleh Kepala Satker di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum*, Jakarta.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggung Jawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum*, Jakarta.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum*, Jakarta.
10. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Internet

1. Website : <http://www.pu.go.id>
2. Website : <http://www.perbendaharaan.go.id>